

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran PPKn Dalam Meningkatkan Ketahanan Pribadi Guru Sekolah Menengah Pertama Remote Area Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

Irwan

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: irwanhamdi@fis.unp.ac.id

Monica Tiara

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: monicatiara@unp.ac.id

Dikirim: 24-8-2021, Direvisi: 09-11-2021, Diterima: 14-12-2021

ABSTRACT

Strengthening Pancasila could be implemented comprehensively if the teacher had a good personal resilience. This was suspected because a civics teacher who had personal resilience was assumed to be a person who had an identity, good character, and had competence. Therefore, this article aimed to analyzed the strengthening of Pancasila in civics learning in increasing the personal resilience of the teacher in remote area.

This article was analyzed using a qualitative approach by determining the informants using purposive sampling technique. Data were obtained through observation, interviews, FGDs and documentation studies then analyzed using the Miles and Huberman technique.

The research findings showed that the formation of teachers' personal resilience was carried out in two forms, namely physically and non-physically. Physically, this was obtain by requiring teachers to conducted rapid antigen tests on a regular basis and provided vaccine facilities through schools, the education office and local government. In addition, it was also done by providing vitamins and hand sanitizer to teachers through self-help schools. Non-physically, this was done through civic literacy by synergizing PPKn MGMP which continued to hold meetings to shared knowledge. The results of civic literacy were used as the basis for selecting suitable materials and methods in learning and strengthening Pancasila in various situations. Furthermore, the results of the study also revealed that the strengthening of Pancasila in Civics learning was carried out by teachers by being role models for students and using the story method to aroused students' enthusiasm in applying the understanding of Pancasila.

Keywords: *Pancasila; Civics Learning; Personal Resilience; Remote area*

ABSTRAK

Penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara komprehensif apabila guru memiliki ketahanan pribadi yang kuat. Hal ini disebabkan karena seorang guru PPKn yang memiliki ketahanan pribadi diasumsikan sebagai orang yang memiliki jati diri, berkarakter baik, dan memiliki kompetensi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn dalam meningkatkan ketahanan pribadi guru SMP *remote area* di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan ketahanan pribadi guru dilakukan dalam dua bentuk yakni secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dilakukan dengan mengharuskan guru melakukan tes rapid antigen secara berkala dan menyediakan fasilitas vaksin melalui sekolah, dinas pendidikan dan pemerintahan daerah setempat. Selain itu, juga dilakukan dengan memberikan vitamin dan hand sanitizer pada guru melalui sekolah secara swadaya. Secara non fisik dilakukan dengan mensinergikan MGMP PPKn dengan tetap melaksanakan pertemuan untuk *sharing* keilmuan. *Sharing* keilmuan yang secara rutin dilakukan MGMP PPKn SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai dijadikan dasar dalam pemilihan materi dan metode yang cocok dalam pembelajaran dan penguatan nilai-nilai Pancasila di berbagai situasi. Lebih lanjut, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn dilakukan guru dengan menjadi teladan bagi siswa. Keteladanan dimunculkan guru dengan menceritakan perjuangannya menuju sekolah untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang dipahaminya.

Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila; Pembelajaran PPKn; Ketahanan Pribadi; Remote area

PENGANTAR

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disebut dengan PPKn adalah salah satu mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang memiliki visi pengembangan pendidikan karakter dalam membentuk peradaban bangsa melalui nilai-nilai Pancasila sebagai substansi dari proses pembelajarannya. Sejalan dengan visi PPKn, Yunisca (2020) menjelaskan bahwa pada hakikatnya PPKn memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki analisis tajam dalam menerima hak serta menjalankan kewajiban bernegara agar siap menjadi warga negara global (*global society*) yang cerdas, kritis dan bermoral. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru PPKn terutama dalam menghadapi pembelajaran masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, pembelajaran masa pandemi menghendaki guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu secara daring/virtual.

Pada triwulan satu tahun 2020 tepatnya bulan Maret menjadi awal merebaknya virus Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, perhatian masyarakat dunia

terpusat pada upaya penanggulangan virus tersebut yang menyebar secara massif. Demi mencegah penyebaran virus, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi pembatasan kegiatan masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang efektif berlaku sejak Maret 2020. Kebijakan ini kemudian diturunkan pada satuan pendidikan melalui SE Mendikbud No 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia. Sejak pemberlakuan SE tersebut maka proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia efektif dilaksanakan secara daring dari rumah baik oleh siswa maupun guru. Sepanjang tahun 2020 kebijakan ini terus berlanjut bahkan semakin diperketat dengan adanya kebijakan *lockdown* lokal di beberapa daerah. Hal ini mengantisipasi kondisi penyebaran Covid-19 yang angkanya semakin meningkat sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021.

Pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021 jumlah warga yang terpapar Covid-19 meningkat drastis sebagai imbas libur panjang. Padahal pemerintah telah menerapkan regulasi yang ketat tentang larangan mudik dan

bepergian bagi masyarakat. Puncaknya pada penghujung Juli 2021 hingga awal Agustus dimana rata-rata kasus harian menembus angka di atas 50 ribu kasus. Angka ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sehingga pemerintah semakin memperketat regulasi dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pada bulan Agustus angka positif harian Covid mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya *tracing* dan *tracking* yang massif, pengetatan pergerakan masyarakat melalui kebijakan PPKM dan yang utama sekali adalah program vaksinasi, sehingga pada September 2021 ketika grafik *positive rate* telah melandai, pemerintah mulai melonggarkan beberapa sektor, merevisi peraturan dan regulasi salah satunya di sektor pendidikan. Pelonggaran kegiatan di sektor pendidikan yaitu pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas.

Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan pemberian izin pemerintahan daerah dilanjutkan dengan izin berjenjang satuan pendidikan dan orang tua (Kemdikbud, 2020). SKB ini ditandatangani oleh empat Menteri Kabinet yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud); Menteri Agama; Menteri Kesehatan; dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan SKB ini, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan (1). Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti; toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer,

dan disinfektan; (2). Kesiapan guru; (3). Kesiapan siswa dan orang tua. Penjadwalan pembelajaran dilaksanakan dengan sistem pergiliran rombongan belajar (Rombel) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Guru yang secara tidak langsung dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran tatap muka dengan sistem pergiliran Rombel, sekaligus melaksanakan pembelajaran secara daring untuk siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Kedua pola pembelajaran ini akan dilaksanakan dalam satu waktu secara bersamaan. Mengingat penularan Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia, pemerintah tidak dapat memaksakan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka sehingga orang tua siswa diberi pilihan untuk menyertakan anaknya dalam pembelajaran tatap muka atau tetap menggunakan sistem daring. Bagi orang tua siswa yang memilih pembelajaran tatap muka maka harus ada surat pernyataan kesediaan dari orang tua untuk menyertakan anaknya dalam pembelajaran tatap muka. Kondisi ini yang menjadi tantangan bagi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan dua metode. Selain itu belum ada pedoman khusus pelaksanaan dua metode pembelajaran ini sehingga guru menjadi kewalahan.

Dengan kondisi demikian, guru PPKn dituntut untuk dapat memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dengan menyeimbangkan antara *old knowledge* dan mekanisme digital. Untuk itu kompetensi guru ditekankan dalam menciptakan proses pembelajaran yang mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan global serta dapat mewujudkan pencapaian tujuan dari PPKn (Alouw, 2020).

Namun, dalam pelaksanaannya guru PPKn menghadapi berbagai persoalan seperti yang terjadi di SMP wilayah tertinggal dan terdepan. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi lokasi pada penelitian ini. Masalah yang dihadapi guru terdiri dari: (1). Pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan telepon pintar, namun tidak semua siswa memilikinya; (2). Sulitnya akses jaringan di beberapa daerah sehingga untuk sebagian siswa yang tidak memiliki gadget dan tidak terjangkau jaringan guru harus datang dari rumah kerumah memberikan pembelajaran; (3). Masalah psikososial siswa yang mengalami kebosanan karena kurangnya interaksi dengan guru dan siswa; (4). Masalah kurangnya pengawasan dan bimbingan siswa terhadap proses pembelajaran, (5). Orang tua yang fokus pada perekonomian keluarga dan kurang memperdulikan proses pembelajaran anak. Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian Zulkarnaen (2019) yang menyatakan bahwa persoalan di wilayah 3T juga meliputi; rendahnya prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, ketidakcocokan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat wilayah terpencil.

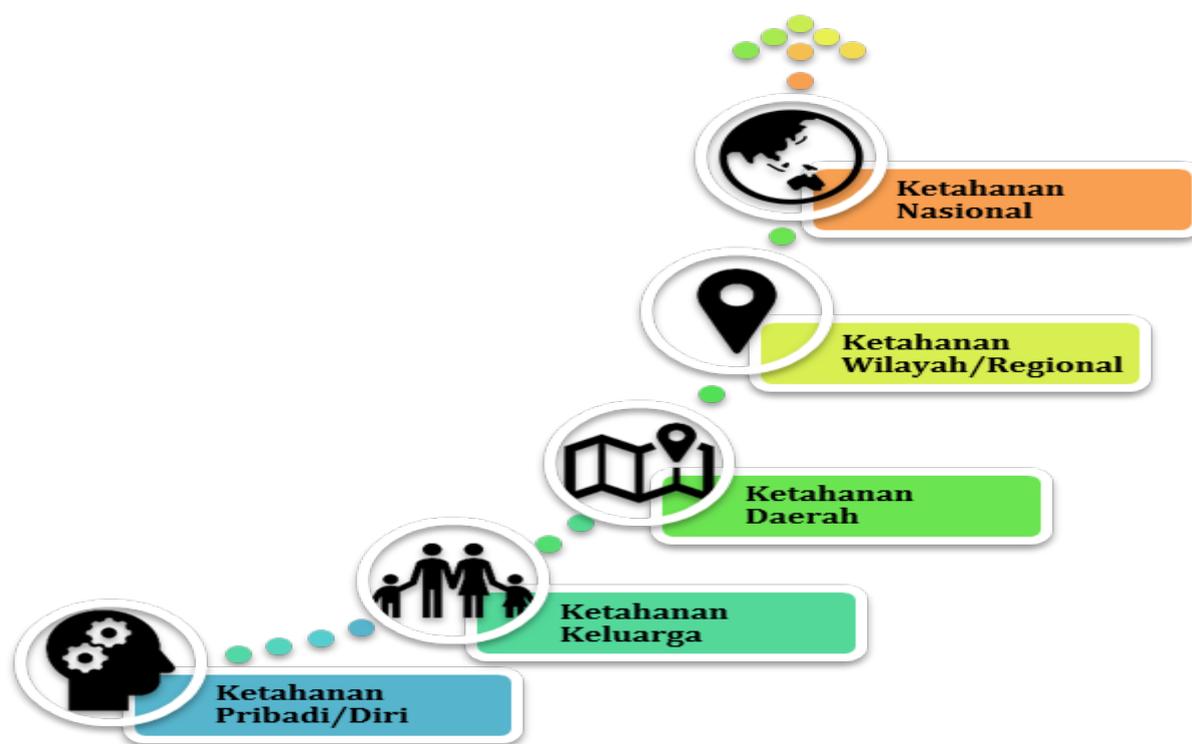
Dinamika ini menunjukkan bahwa penginternalisasian nilai-nilai karakter Pancasila menjadi urgen untuk diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn. Monica (2020) menjelaskan bahwa penginternalisasian nilai-nilai karakter Pancasila menjadi tanggungjawab guru dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai Pancasila yang diinternalisasikan adalah nilai-nilai yang memiliki konteks pembangunan visi berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan warganegara Indonesia yang ideal (Suradi, 2019). Lebih lanjut, Rohim (2020) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang dapat

dipedomani dalam hidup bernegara. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga menjadi tameng bagi ketahanan negara dalam menghadapi berbagai isu kenegaraan seperti narkoba dan LGBT (Indrawadi, 2021). Dengan kata lain, Pancasila memiliki struktur nilai yang berjenjang dengan setiap jenjangnya saling terhubung sehingga perlu untuk dipahami secara komprehensif sebelum diimplementasikan. Untuk mengimplementasikan Pancasila pada proses pembelajaran, sejatinya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn dalam meningkatkan ketahanan pribadi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) *Remote Area* di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat.

Ketahanan pribadi merupakan pondasi utama dan mendasar dalam mewujudkan ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan pribadi menjadi fondasi utama dan mendasar dalam mewujudkan ketahanan nasional (Hamdi, 2016). Jika ketahanan pribadi seseorang sudah baik dan tangguh maka akan memperkuat ketahanan keluarga. Selanjutnya ketahanan keluarga menjadi bagian dalam mewujudkan ketahanan di suatu daerah. Ketahanan daerah berikutnya menjadi unsur dalam mewujudkan ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah di Indonesia dapat didefinisikan menurut zona waktu, pulau, dan arah mata angin. Pada akhirnya integrasi ketahanan wilayah menjadi cikal bakal kuat dan tangguhnya ketahanan nasional. Konsep ini ditunjukkan pada Gambar 1.

Dengan demikian, ketahanan pribadi dapat dirumuskan sebagai kondisi dinamis seseorang yang berisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi ancaman, hambatan, tantangan baik yang datang dari

Gambar 1
Ketahanan Nasional Berlapis



Sumber: Hamdi, 2016.

luar maupun dari dalam diri. Ketahanan pribadi atau ketahanan diri manusia, baik sebagai personal maupun sebagai warga negara bangsanya atau warga dunia akan terletak pada kekuatan jati diri. Jati diri tersebut ditumbuh berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan perlu ditanamkan sejak dini (Anggraini, 2020).

Ketahanan pribadi guru dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan guru dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara fisik maupun psikis untuk membentuk identitas dan integritas peserta didik yang berkarakter Pancasila. Dengan kuatnya konsepsi ketahanan pribadi guru, maka guru dapat melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik secara komprehensif. Hal ini ditenggarai karena seseorang yang memiliki ketahanan pribadi

adalah orang yang memiliki jati diri yang kuat, memiliki karakter yang baik, dan tentu saja memiliki kompetensi. Ketahanan pribadi dalam konteks ketahanan nasional dapat dibentuk dengan berbagai cara. Secara praktik, ketahanan pribadi dapat dibentuk melalui pendidikan, pengajaran, pelatihan, perilaku disiplin, sikap menghargai dan manajemen waktu, berpikir positif, mengetahui kelebihan dan kelemahan diri, serta mampu menjadi manusia yang berkontribusi memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar (Irawan, 2014).

Menyikapi hal tersebut, artikel ini akan mengelaborasi pertanyaan terkait: Bagaimana realitas pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMP *remote area* Kabupaten Kepulauan Mentawai? Kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan terkait: Bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila pada

pembelajaran PPKn dalam meningkatkan \ ketahanan pribadi guru di SMP *remote area* di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Kabupaten Kepulauan Mentawai dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan satu-satunya daerah yang masih berstatus daerah tertinggal di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun (2020) tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Berdasarkan Perpres tersebut dijelaskan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Secara konstitusional, Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Undang Undang No.49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten yang pernah diterjang gempa dan tsunami tahun 2010 ini terdiri dari 4 pulau utama yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan serta pulau-pulau kecil yang berada di sekelilingnya. Secara keseluruhan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah sekitar 6.034 km² yang dihuni sejumlah 87.623 orang penduduk pada tahun 2020 (BPS, 2020). Mayoritas penduduk Mentawai merupakan warga asli dengan Kristen dan Katolik sebagai agama mayoritas. Untuk mencapai Tuapejat sebagai ibukota kabupaten dari ibukota propinsi, diperlukan waktu 3 jam menggunakan kapal cepat dan 10 jam menggunakan kapal penyeberangan orang dan barang. Selain menggunakan jalur laut, sebenarnya di Mentawai telah berdiri bandara Rokot yang melayani penumpang dari bandara di Padang. Namun frekuensi penerbangan masih sedikit sehingga tidak berdampak

signifikan terhadap pergerakan penumpang menuju dan dari Kepulauan Mentawai.

Sebagai daerah yang masih tertinggal, tak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan di daerah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan 18 kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Begitupun dengan indeks pembangunan manusia yang masih rendah, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Dari sisi kuantitas satuan pendidikan, berdasarkan data BPS tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya memiliki 25 SMP negeri dan 7 SMP swasta dan 3 MTs (BPS, 2020).

Berangkat dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan karena kualitatif dapat mendeskripsikan suatu fenomena dengan Bahasa dan kata-kata serta langkah-langkah ilmiah (Moleong, 2014). Melalui metode kualitatif penelitian ini menghasilkan data secara terperinci terkait penguatan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn dalam meningkatkan ketahanan pribadi guru *remote area* di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*) dan studi dokumentasi dalam kurun waktu 6 bulan. Penelitian dilakukan di SMP *remote area* yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni SMPN 1 Sipora, SMP Kristen Cahaya Bangsa, SMPN 2 Sipora Selatan, dan SMP Integral Hidayatullah. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 8 orang guru PPKn, 4 Kepala Sekolah dan 40 orang siswa.

Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan observasi lapangan

terhadap sekolah mengenai penerapan pembelajaran di wilayah *remote area* masa Pandemi Covid-19. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran mulai dari kesiapan guru, siswa, dan pelaksanaan pembelajaran. Hasil observasi kemudian dikelompokkan dalam 2 bentuk yakni ditinjau dari kondisi fisik guru, siswa, sekolah dan kondisi non fisik guru, siswa dan sekolah. Data hasil observasi dilanjutkan dengan wawancara untuk menggali lebih dalam bagaimana guru secara pribadi melakukan upaya pertahanan diri dalam rangka penguatan nilai-nilai karakter Pancasila pada siswa dalam pembelajaran, dan wawancara dengan siswa untuk menggali bagaimana respon dan dampak dari penguatan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan guru melalui peningkatan ketahanan pribadi guru. Kemudian dilakukan FGD untuk mendengarkan pendapat dan saran serta diskusi dengan berbagai tokoh seperti guru, pihak sekolah, tokoh pendidikan dan masyarakat setempat serta praktisi pendidikan terkait permasalahan yang diteliti. Analisis data berpedoman pada teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Almanshur, 2016). Gambar 2 menunjukkan rangkaian analisis data teknik Miles dan Huberman (Miles dan Huberman: 1992).

Gambar 2 tersebut menjelaskan rangkaian analisis data yang diawali dengan tahapan reduksi data. Reduksi data merupakan tahap mengumpulkan dan mengelompokkan data dari seluruh informasi yang didapatkan

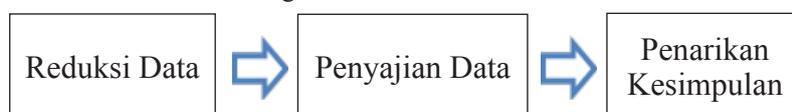
melalui proses wawancara. Selanjutnya tahap penyajian data merupakan pemaparan data yang diperlukan dalam penelitian dan membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dan tidak terkait dengan penelitian. Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah kegiatan menginterpretasi data penelitian untuk dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang didapatkan. Demi menguji keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan teknik triangulasi sumber yakni mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda misalnya membandingkan hasil observasi dengan dokumen hasil wawancara atau membandingkan hasil observasi dengan dokumen yang sudah ada (Bachri, 2010).

PEMBAHASAN

Realitas Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Di SMP Remote Area

Digitalisasi pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 merupakan salah satu upaya dalam menjaga agar pelaksanaan pembelajaran tetap terlaksana meski kondisi yang tidak normal yakni dengan melaksanakan program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pelaksanaan PJJ dengan sistem daring telah menuai beragam persoalan. Salah satu persoalan krusial yang dihadapi guru adalah kesulitan dalam memantau dan membina para siswa secara langsung, sebab seperti diketahui bahwa pada dasarnya guru tidak hanya sebagai pendidik namun juga dituntut memberikan teladan yang baik serta menanamkan nilai-nilai karakter yang baik bagi siswa-siswanya. Ketika hal tersebut tidak dapat terlaksana maka

Gambar 2. Gambaran Rangkaian Analisis Data Teknik Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman, 1992

ini berdampak pada merosotnya moral siswa dan kesulitan guru melakukan pembinaan nilai pada pelaksanaan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Subahri (2021) dan Nurohmah (2021) menemukan bahwa saat dan setelah dilaksanakannya pembelajaran daring dunia pendidikan dihadapkan pada persoalan baru yakni persoalan moral siswa yang menurun sebagai dampak sistem daring yang berjalan tanpa pengawasan dan pemodelan nyata dari seorang guru. Bahkan Mendikbud RI Nadiem Makarim dalam satu kesempatan menyebut bahwa pembelajaran jarak jauh telah membuat siswa kehilangan satu tahun pendidikan, berikut kutipannya:

“Semua riset kita telah membuktikan bahwa anak-anak Indonesia telah kehilangan satu tahun pembelajaran. Mau buat PJJ (pembelajaran jarak jauh) atau tidak. Bagi yang PJJ rata-rata kehilangan satu tahun pendidikan (Nadiem)” (Arfah, 2021).

Kenyataan seperti ini tentu sangat disayangkan dan tidak dapat dibiarkan berkelanjutan. Penyelesaian persoalan ini telah diupayakan pemerintah seiring dengan menurunnya angka positif Covid-19 di Indonesia yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka masa pandemi melalui SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap 2020/2021 (Kemdikbud, 2020). Terjadinya perubahan regulasi penyelenggaraan pendidikan masa pandemi yang pada awalnya tanpa tatap muka menjadi tatap muka terbatas dan bersyarat. Penyesuaian sistem pendidikan ini merujuk pada pembelajaran penanganan covid-19 bidang non kesehatan yang dikeluarkan oleh Bappenas RI Tahun 2021. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi *learning loss* dan meluasnya

kesenjangan capaian pendidikan. Meskipun, kenyataannya pembelajaran tatap muka yang baru dilaksanakan beberapa bulan terakhir juga menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya guru-guru merasa kewalahan menghadapi siswa yang memiliki sikap acuh terhadap pembelajaran, mudah tersinggung, sering bertengkar dan tidak menghargai guru (Zaenullah, 2018).

Persoalan lain yang dihadapi adalah persoalan merosotnya moral, rendahnya motivasi siswa datang sekolah dan kesulitan pembinaan nilai dalam pembelajaran khususnya pembelajaran PPKn juga dihadapi oleh guru-guru PPKn di SMP wilayah *remote area* Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat dan satu-satunya wilayah *remote area*. Pengkategorian wilayah *remote area* didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2014 menjelaskan bahwa suatu daerah yang termasuk daerah 3T dipandang dari aspek; lemahnya perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana-prasarana, kemampuan keuangan daerah dan aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Secara eksplisit, PP tersebut tidak menjelaskan aspek pendidikan sebagai salah satu indikator ketertinggalan suatu daerah. Padahal sejatinya aspek pendidikan merupakan kunci utama dalam mengukur kemajuan suatu wilayah. Sektor pendidikan sangat terkait dengan pembangunan sumber daya manusia di daerah, baik pendidikan sebagai faktor penggerak pembangunan ataupun kondisi kurangnya sarana dan prasarana pendidikan sebagai akibat dari ketertinggalan tersebut (Koesnandar, 2018; Listiqowati, 2021).

Berbicara mengenai aksesibilitas, untuk menuju sekolah guru-guru khususnya

guru PPKn SMP di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor sejauh 2 s/d 10 Km². Hasil obsevasi juga menunjukkan bahwa kondisi jalan sebagian masih rusak atau belum diaspal. Sulitnya akses menuju sekolah berdampak pada sepiunya jumlah warga sekolah ditinjau dari kehadiran guru dan siswa. Kondisi sebagian akses jalan menuju sekolah ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3
Sebagian Akses Jalan Menuju Sekolah

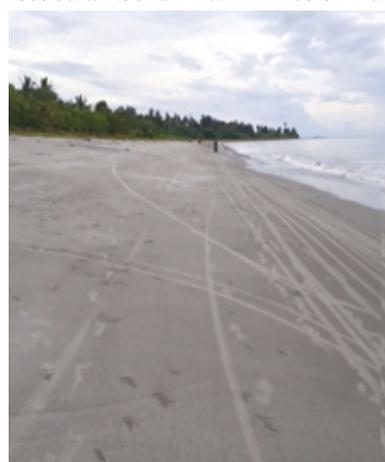


Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Gambar 3 tersebut merupakan jalanan berlumpur yang harus dilalui oleh guru-guru setiap hari untuk mencapai sekolah maupun melaksanakan pembelajaran ke rumah-rumah siswa. Kondisi jalan akan semakin parah ketika musim hujan atau air laut pasang bagi wilayah pesisir pantai. Bahkan ketika peneliti berada di lokasi, beberapa jasa rental motor di Mentawai tidak mengizinkan motornya disewa jika akan melalui beberapa kawasan dengan jalanan rusak seperti Monga, Beriulo, Nemnemleuleu, dan Katiet. Hal tersebut dengan alasan sepeda motor akan mengalami kerusakan mesin dan perangkat keras lainnya. Mirisnya, di beberapa daerah di atas, terdapat sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA.

Di beberapa kawasan, warga juga memiliki jalur alternatif untuk menghindari jalan yang rusak yaitu sepanjang pesisir pantai, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4
Akses Jalan Sehari-hari Di Pesisir Pantai



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Gambar 4 tersebut menunjukkan kawasan pesisir pantai di Mentawai yang dijadikan sebagai jalur perjalanan sehari-hari. Terlihat bekas laluan kendaraan bermotor di sepanjang pantai dan beberapa pesepeda motor yang melintas. Hal ini dilakukan untuk menghindari jalan utama yang kondisinya rusak parah. Tentu saja tindakan ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan karena kontur pasir pantai yang lunak dan sewaktu-waktu dapat diterjang ombak besar. Apalagi seperti yang diketahui bersama bahwa pesisir Kepulauan Mentawai terkenal memiliki ombak yang besar dan tinggi sehingga membuatnya terkenal hingga mancanegara.

Dengan waktu tempuh yang demikian beberapa kali guru justru memperoleh hasil yang mengecewakan dimana dalam beberapa jadwal kunjungan ke rumah siswa, justru tidak ada satupun siswa yang hadir. Alhasil pembelajaran tidak terlaksana pada hari tersebut namun besoknya tentu guru kembali

datang ke rumah siswa sebagai bagian dari tanggungjawabnya sebagai pendidik. Pengalaman ini disampaikan oleh salah seorang guru bernisial RN berikut ini:

“pernah kita sudah jauh-jauh datang malah tidak ada siswanya. Ternyata mereka dibawa ke ladang, kebetulan saat panen padi jadi dia bantu orang tua dan diajaknya lah teman-temannya kesana. Kita mau marah juga gimana, orang tuanya yang ngajak kan, tapi Namanya guru tentu gak boleh nyerah besok datang lagi”

Hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, selama pemberlakuan pertemuan tatap muka terbatas menunjukkan bahwa guru-guru hadir disekolah 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk mengurus persoalan administrasi, mengupdate keilmuan, berinteraksi dengan guru lain dan bertemu dengan siswa yang telah dijadwalkan sebelumnya. Untuk pertemuan guru dengan siswa dalam seminggu dilakukan satu kali untuk siswa mengumpulkan tugas dan guru memberikan tugas baru untuk kembali dikerjakan siswa. Siswa datang secara berkelompok 5-6 orang secara bergantian. Namun, selama observasi yang dilakukan siswa yang menemui guru PPKn di *remote area* rata-rata 10 orang. Dari hasil wawancara bersama guru diketahui bahwa jumlah siswa perkelas 10 s.d 20 orang, dan jumlah ini berkurang selama pandemi.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan bersama guru, orang tua, tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan, berkurangnya jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar selama Pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

Pertama, orang tua dan siswa sulit memahami pola pembelajaran dari rumah. Hal ini disebabkan latarbelakang pendidikan

orang tua siswa yang tergolong rendah, bahkan cenderung tidak pernah mengenyam pendidikan.

Kedua, orang tua dan siswa yang berada di *remote area* tidak mengetahui Covid-19 secara spesifik karena minimnya informasi dan edukasi tentang penyebaran virus tersebut. Bahkan sebagian siswa dan orang tua merasa virus Covid-19 tidak percaya akan adanya penyebaran virus tersebut.

Ketiga, orang tua siswa mengalami permasalahan perekonomian karena terbatasnya mata pencarian. Mata pencarian orang tua siswa rata-rata adalah buruh pelabuhan yang selama pandemi tidak bekerja karena terhentinya aktivitas pelabuhan. Selain itu orang tua siswa yang pedagang dan petani juga terkena dampak kurangnya aktivitas jual beli. Kondisi ini berimplikasi pada siswa yang orang tuanya terdampak pandemi harus membantu mencukupi kebutuhan keluarga dengan ikut melaut, berdagang, beladang dan bertani atau mencari kesibukan lain demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Keempat, banyak orang tua siswa yang tidak memiliki telepon pintar (*smartphone*) yang *compatible* sebagai media pembelajaran jarak jauh.

Kelima, sebagian wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum terkoneksi jaringan listrik dan internet.

Keenam, saat pembelajaran tatap muka dilangsungkan siswa kehilangan motivasi belajar karena terlalu banyak dirumah dan berkurangnya jumlah teman yang datang kesekolah.

Faktor-faktor tersebut dialami oleh kebanyakan siswa SMP di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama proses pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas imbas Pandemi Covid-19.

Persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah ini tidak hanya persoalan akses, fasilitas dan guru, namun juga persoalan penguatan nilai yang selama ini terabaikan. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji upaya penguatan nilai-nilai karakter siswa melalui pembelajaran PPKn karena mata pelajaran PPKn dalam pembelajarannya tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif siswa tetapi juga afektif siswa. Mata pelajaran PPKn sejatinya bertujuan untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Secara khusus, tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKn adalah untuk menjadikan peserta didik: (1). Memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif; (2). Secara sukarela berpartisipasi aktif dalam segala bidang kegiatan dan bertanggung jawab tidak hanya di sekolah tapi juga ketika berada di tengah masyarakat dan keluarga; (3). Dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter asli masyarakat Indonesia sehingga dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya; (4). Sebagai bagian dari masyarakat dunia maka diharapkan siswa mampu dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain baik secara langsung ataupun tidak, melalui pemanfaatan teknologi dan informasi (Masyitoh, 2019).

Pembelajaran PPKn melalui sistem daring ataupun tatap muka harusnya dilaksanakan dengan mendidik siswa untuk mengembangkan rasa hormat menghormati terhadap nilai-nilai yang dianut orang lain dan adanya keinginan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok yang heterogen. Dalam melakukan pembinaan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran PPKn dapat menyadarkan siswa akan pentingnya saling menghargai perbedaan dan bahwa perbedaan

nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok di tengah masyarakat. Ini disebabkan secara substantif PPKn sejatinya merupakan satu-satunya mata pelajaran yang diberi amanah untuk membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik berdasarkan kepada Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Problematika yang dihadapi guru PPKn di SMP *remote area* Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah tidak memiliki kesempatan memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap suatu materi kepada siswa sehingga siswa kesulitan dalam mengingat materi dan tidak memiliki ruang untuk pendalaman materi karena keterbatasan akses. Hal ini mengakibatkan pengajaran PPKn di Indonesia yang masih pada titik minimal. Sebagaimana yang ditemukan dari hasil penelitian bahwa guru PPKn SMP mengajar tidak secara konsisten mengikuti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun, sebab guru dalam pembelajaran cenderung menyesuaikan dengan kondisi siswa yang lambat menganalisis pembelajaran. Dalam hal ini, guru akan mengulang topik bahasan yang sama dua hingga tiga kali sampai siswa benar-benar dapat memahami dengan baik.

Ditambah lagi, guru PPKn di lokasi penelitian cenderung menggunakan metode pembelajaran ceramah pada proses pembelajaran. Pada penggunaan metode ceramah guru menemui kendala untuk menghubungkan materi dengan kondisi siswa yang jauh dari informasi kenegaraan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David Kerr (1999) bahwa *Citizenship Education* dalam pembelajaran berada pada titik minimal ditandai oleh:

“Thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, know-ledge-

based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice

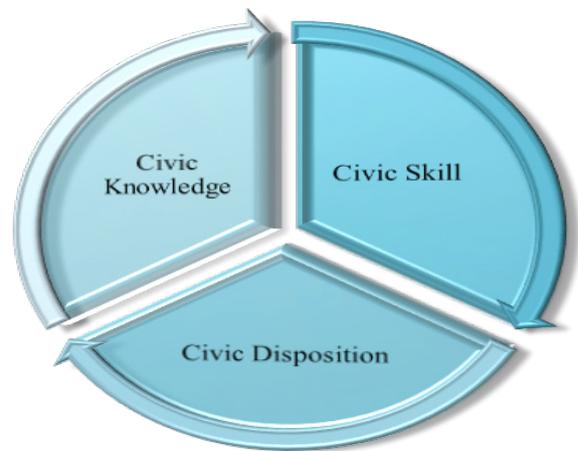
Artinya, PPKn masih didefinisikan secara sempit, berbentuk pengajaran kewarganegaraan bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya yang mudah diukur (Purwanto, 2020). Seyogyanya materi PPKn yang bermuatan karakter dapat dikaitkan dengan kondisi di lingkungan sekitar sekolah agar siswa dapat dilibatkan selama proses pembelajaran melalui diskusi, pemecahan masalah dan kerja kelompok (*collaborative learning*).

Penguatan Nilai-nilai Karakter Dalam Pembelajaran PPKn Guna Memperkuat Ketahanan Pribadi

Urgensi ketahanan pribadi guru ini pada dasarnya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan nasional (Hamdi, 2016). Oleh karena itu, ini dapat menjadi habituasi baru dalam pembelajaran PPKn dimana siswa akan lebih mudah untuk menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila berupa pemahaman, sosok guru teladan, dan ditunjang oleh ketahanan pribadi yang kuat dan tangguh. Nilai-nilai Pancasila yang dikuatkan melalui pembelajaran PPKn adalah nilai religious, nasionalis, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan gotong royong. Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui ketahanan pribadi guru sejalan dengan kompetensi pembelajaran PPKn yakni *civic knowledge* (pengetahuan warganegara), *civic disposition* (sikap warganegara) dan *civic skill* (keterampilan warga negara) (Gambar 5).

Civic competence adalah kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Salah satu dari keempat kompetensi kewarganegaraan *civic disposition*

Gambar 5
 Kompetensi Pembelajaran PPKn



Sumber: Olahan Sendiri, 2021

adalah kompetensi kewarganegaraan yang fokus mengembangkan sikap ataupun karakter kewarganegaraan. Menurut Branson (1999), *Civic disposition* menjadi kompetensi esensial dalam pembelajaran PPKn, dimana pengembangan watak adalah muara dari pembelajaran PPKn. Hal ini dikarenakan sikap dan pola pikir seseorang sebagai warga negara menjadi motor penggerak fungsi sosial dalam suatu negara. Dalam pembelajaran PPKn sesungguhnya yang dikembangkan adalah karakter publik, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
 Karakter Publik Warga Negara

Peran dalam masyarakat	Karakter yang harus dikembangkan
Menjadi anggota masyarakat	Independen
Menjalankan hak politis dan ekonomi	Bertanggungjawab secara personal
Bersosialisasi dalam masyarakat	Menghargai harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia
Aktif dalam urusan kewarganegaraan	Turut melaksanakan demokrasi konstitutif secara aktif

Sumber : Branson, 1999.

Tabel 1 tersebut menjelaskan bahwa *civic disposition* menjadi pengarah untuk menjawab

pertanyaan terkait bagaimana membentuk karakter warga negara dan karakter apa yang akan dibentuk. Maka, untuk mewujudkan *civic disposition* dalam pembelajaran dibutuhkan penguatan nilai. Nilai-nilai tersebut telah ada dalam pembelajaran PPKn yang mencakup penerimaan, keterbukaan, toleransi, kooperatif, solid dan memiliki semangat kebangsaan. Bagi guru PPKn SMP yang mengemban mata pelajaran PPKn memerlukan penguatan nilai yang sama dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan hasil observasi peneliti, selama ini fokus penguatan nilai adalah siswa, karena siswa dianggap menjadi output dari pendidikan. Keberhasilan pendidikan diletakkan pada ketepatan pemahaman, analisis, kepiawaian bersikap dan bertindak seorang siswa. Padahal, guru adalah pioneer dari sistem pendidikan itu sendiri. Rahman (2018) menjelaskan untuk menciptakan siswa yang mampu berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan guru yang memiliki komitmen dan tanggung jawab. Guru yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang dimaksud adalah guru-guru yang dapat menghayati nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai luhur Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang menyangkut suasana kebatinan, cita-cita hukum dan sumber nilai dan moral. Nilai-nilai tersebut berupa satu kesatuan utuh yang harus dipahami dan dihayati guru persoalan religiusitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi dan keadilan.

Penguatan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKn diasumsikan dapat meningkatkan ketahanan pribadi guru. Kuatnya konsepsi ketahanan pribadi yang dimiliki guru membantunya untuk terhindar dari sikap emosional yang dilakukan tanpa disadari, seperti melampiaskan kemarahan pada siswa, hanya bersikap baik pada siswa

tertentu, tidak sabar dan tidak memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang memadai (Sudirman, 2021). Maka, urgensi ketahanan pribadi bagi guru adalah untuk membentengi dirinya dengan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian bahwa guru-guru yang mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai *way of life* mampu menjadikan suasana pembelajaran yang lebih hangat. Siswa mudah tersentuh dengan guru yang sungguh-sungguh dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Siswa mudah menerima apa-apa yang disampaikan guru dalam pembelajaran karena adanya perasaan hormat sekalipun dalam prosesnya tetap saja ada siswa yang malas-malasan, membantah. Hasil penelitian menunjukkan 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) orang siswa yang diobservasi menunjukkan sikap hormat dan peduli pada guru serta semangat mengikuti pembelajaran.

Guru-guru yang memiliki komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya dan pembelajaran dari hasil penelitian di atas. Mampu menciptakan pembelajaran yang peka terhadap kebutuhan dari peserta didik sebagai warga negara. Hal inilah yang menjadi urgensi dalam penguatan nilai-nilai Pancasila melalui ketahanan pribadi guru. Secara praktis, ketahanan pribadi dapat dibentuk untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar (Irawan, 2014). Ketahanan pribadi guru yang harus ditingkatkan adalah kemampuan guru untuk profesional, cakap dengan kompetensi yang dimilikinya serta memiliki karakter dan jati diri kuat berlandaskan Pancasila, sehingga ketahanan guru dilihat dari pola guru dalam melihat dan menghadapi berbagai persoalan dan kemampuannya bertahan secara fisik maupun non fisik dalam dinamika pendidikan.

Guru diharap mampu mengambil langkah-langkah cepat pada proses pembelajaran dan pengajaran diberbagai situasi sulit seperti kondisi Pandemi Covid-19.

Sebagai pondasi dasar dari ketahanan nasional, ketahanan pribadi guru dapat dilakukan secara fisik dan non fisik. Secara non fisik dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kemampuan warga negara mengatasi masalah-masalah politik dan kenegaraan (Raharjo, 2017). Maka, ketahanan pribadi guru dalam penelitian ini juga dilakukan untuk membantu guru mengembangkan materi dan memilih metode pembelajaran yang tepat terutama dalam menghadapi situasi pembelajaran masa pandemi. Guru dituntut untuk mampu memahami dengan baik substansi materi PPKn yang akan diajarkan, agar siswa dapat menemukan esesnsi nilai dari pembelajaran melalui keterampilan guru memberikan pemahaman terkait materi pembelajaran. Ketetapan pemilihan materi dan metode tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki guru (Montessori, 2020).

Ketahanan pribadi guru PPKn SMP *remote area* di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara non fisik dilaksanakan melalui program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn. Program MGMP di *remote area* selama pandemi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Program tersebut terdiri dari pengelompokan guru menjadi beberapa kelompok yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber informasi terkait materi pembelajaran. Hasil yang didapatkan kelompok kecil kemudian dirumuskan dan dibagikan pada kelompok besar dengan cara presentasi dan dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok. Namun, karena situasi yang tidak memungkinkan, kegiatan tidak dihadiri

oleh narasumber secara tatap muka dan juga tidak dapat dilaksanakan secara daring karena keterbatasan jaringan internet. Maka kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri oleh guru-guru yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara mandiri melalui MGMP PPKn SMP guru-guru yang berasal dari sekolah berbeda berkolaborasi untuk menciptakan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan seperti perangkat pembelajaran masa pandemi. Kolaborasi yang dilakukan guru melalui MGMP memberikan dampak positif secara emosional terhadap guru. Hal ini dikarenakan guru merasa mendapat dukungan dalam menyusun perangkat pembelajaran untuk menghadapi pembelajaran masa Pandemi Covid-19. Praktik kolaborasi memunculkan kepercayaan diri dan kepuasan bagi guru dalam melahirkan inovasi dalam perangkat pembelajaran. Monica (2020) menjelaskan bahwa kolaborasi membantu guru mengidentifikasi nilai-nilai afektif yang dapat dikembangkan dalam diri siswa melalui pembelajaran PPKn. Perangkat pembelajaran yang disusun terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi ajar dan media pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut dijadikan acuan bagi guru untuk menyusun kembali secara mandiri dan disesuaikan dengan kondisi siswa serta sekolah masing-masing. Kolaborasi guru membuat guru merasa senang dan nyaman mempersiapkan pembelajaran (Afrizilna, 2021). Ketahanan pribadi guru melalui kolaborasi di MGMP menghasilkan guru-guru yang siap menghadapi pembelajaran baik secara teknis maupun secara mental. Melalui wawancara penelitian guru-guru mengungkapkan bahwa kolaborasi terbangun tidak hanya dilakukan dalam hal pembelajaran

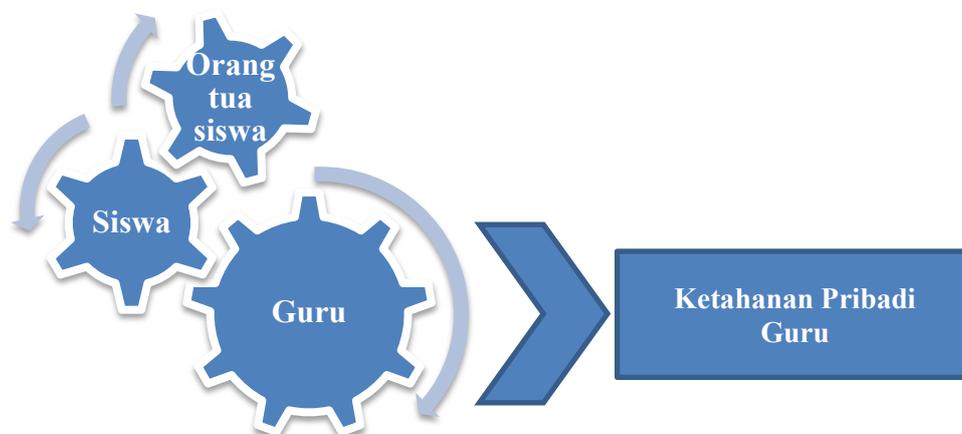
tetapi juga menyangkut persoalan pribadi yang dihadapi guru seperti merasa stress karena selama pandemi beban yang diemban guru menjadi ganda, apalagi bagi guru yang harus mendatangi siswa dari rumah ke rumah.

Ketahanan pribadi guru secara non fisik juga dilakukan melalui sinergitas antara guru, siswa dan orang tua siswa. Sinergitas dibangun dengan memperbaiki komunikasi dan melakukan komunikasi secara intensif. Guru dapat mengontrol perkembangan siswa secara berkala melalui orang tua murid. Salah satu guru yang diwawancarai menjelaskan bahwa ia bertemu orang tua siswa saat berangkat ke ladang tempat bekerja. Pertemuan tersebut digunakan guru sebagai cara untuk mengkomunikasi perihal perkembangan anaknya disekolah maupun dirumah saat pembelajaran. Harapannya agar orang tua juga dapat mengontrol anak selama berada di rumah. Sementara, untuk orang tua siswa lainnya yang tidak dapat ditemui langsung, guru memintanya ke sekolah melalui siswa ataupun menitip pesan melalui guru lain yang dekat rumah. Sinergitas yang terbangun antara guru, siswa dan orang

tua siswa membantu guru meningkatkan ketahanan dirinya sehingga merasa lega dan dapat mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Sinergi antara siswa, orang tua siswa serta guru ditunjukkan pada Gambar 6.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai juga dilakukan melalui keteladanan dengan menunjukkan rasa peduli satu sama lain, rasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, serta membangun rasa cinta tanah air saat pembelajaran tatap muka di rumah siswa. Saat kunjungan dilakukan guru, beberapa siswa sudah menunggu yang berjumlah 2 s.d 4 orang sehingga penguatan nilai dilakukan guru dengan memberikan cerita terkait implementasi Pancasila sebagai sebuah tindakan bersama. Salah satunya dengan cara menceritakan sulitnya perjuangan guru dalam mengakses rumah siswa tersebut yang dapat dikorelasikan dengan perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan dan membangkitkan jiwa nasionalisme siswa untuk lebih giat belajar agar dapat menjadi bagian perubahan dalam negara khususnya membangun perubahan di lingkungan tempat tinggal saat ini. Cerita ini dilakukan guru

Gambar 6
Sinergi Guru, Siswa, Dan Orang Tua Siswa



Sumber: Olahan Peneliti, 2021.

secara berulang sehingga siswa mengerti dan lebih memahami kondisi tersebut.

Ketahanan pribadi guru secara fisik dilaksanakan sejalan dengan himbauan Dinas Pendidikan setempat guru-guru diharuskan untuk melakukan tes antigen untuk memastikan kondisi kesehatan guru yang akan melaksanakan pembelajaran baik daring, tatap muka maupun dari rumah ke rumah bagi guru di *remote area*. Tidak hanya tes anti antigen secara berkala guru-guru juga diharuskan untuk mengikuti vaksinasi pada puskesmas yang telah ditentukan. Selain itu, sekolah juga dilengkapi akses sanitasi, alat cuci tangan, *hand sanitizer* meskipun tidak selengkap yang tersedia di sekolah luar wilayah *remote area*. Guru-guru juga dibekali dengan vitamin dan pengontrolan kesehatan melalui *whatsapp group* sekolah dan kelompok guru mata pelajaran PPKn.

Peningkatan ketahanan pribadi secara fisik tersebut dapat dikembangkan guru sebagai penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

Pertama, memberikan pemahaman kondisi negara selama Pandemi Covid-19, peran serta warga negara dan upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan penularan dalam lingkungan siswa pada pembelajaran PPKn. Hal ini, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan selama pembelajaran, terlebih lagi pemberian pemahaman dilakukan secara berulang-ulang.

Kedua, memberikan teladan kepada siswa bagaimana menerapkan protokol kesehatan di sekolah dan selama proses pembelajaran berlangsung, sebab sejatinya guru tidak hanya sebagai pendidik namun tindak tanduk dan perilaku sehari-hari akan

menjadi teladan bagi siswa. Sebagaimana yang disampaikan Hijrawati, dkk (2021) bahwa secara fisik menerapkan protokol kesehatan di sekolah dapat dilakukan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak selama berada di lingkungan sekolah. Komitmen guru dalam menerapkan protokol kesehatan secara konsisten tidak hanya berdampak pada kuatnya ketahanan pribadi guru secara fisik, tetapi juga berimplikasi pada matangnya siswa memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Terbentuknya ketahanan pribadi guru berimplikasi pada munculnya semangat guru untuk melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila agar siswa memiliki ketahanan pribadi yang sama baiknya dengan yang dimiliki guru.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan SKB empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan pemberian izin pemerintahan daerah dilanjutkan dengan izin berjenjang satuan pendidikan dan orang tua. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan (1). Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti; toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*, dan disinfektan; (2). Kesiapan guru; dan (3). Kesiapan siswa dan orang tua. Penjadwalan

pembelajaran dilaksanakan dengan sistem pergiliran rombongan belajar (Rombel) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Guru dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran tatap muka dengan sistem pergiliran Rombel, sekaligus melaksanakan pembelajaran secara daring untuk siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Kondisi ini berimplikasi pada ketahanan pribadi guru khususnya guru PPKn dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa Pandemi Covid-19 terutama yang berada di wilayah tertinggal dan terdepan yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Guru PPKn di wilayah tersebut dihadapkan pada berbagai persoalan mulai dari beban kerja lebih dengan adanya pembelajaran sistem pergiliran Rombel dan sistem daring hingga menghadapi kesulitan jaringan internet, ketidaksiapan guru dan siswa dengan perangkat elektronik, persoalan penanaman nilai dalam pembelajaran masa pandemi tetapi juga persoalan ketidakpahaman guru dalam membangun ketahanan pribadi mereka.

Kedua, menyikapi hal tersebut, penguatan nilai-nilai karakter Pancasila pada pembelajaran PPKn di *remote area* dapat dilakukan secara fisik dan non fisik. Secara non fisik dilaksanakan melalui kolaborasi dengan MGMP dan sinergitas guru serta orang tua. Sementara secara fisik dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan covid 1-9 dan memberikan kepastian keamanan fisik guru dengan menyelenggarakan vaksin serta tes rapid antigen berkala. Untuk penguatan nilai dilakukan guru dalam pembelajaran dengan menjadi teladan terhadap siswa serta menceritakan perjuangan yang dapat membangkitkan nasionalisme siswa sehingga

tertarik untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang dipahaminya. Penguatan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKn ini pada gilirannya akan berimplementasi pada penguatan ketahanan pribadi guru.

Selanjutnya, disusun beberapa butir rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, kondisi Pandemi Covid-19 dapat menjadi upaya pemerintah untuk memberikan perhatian lebih demi peningkatan kesejahteraan guru-guru khususnya di wilayah tertinggal. Prinsip keadilan jelas tidak berarti menyamaratakan, artinya kebijakan pemerintah mesti memerhatikan kondisi dan karakteristik tiap-tiap daerah sehingga dapat diimplementasikan secara proporsional sesuai kemampuan daerah.

Kedua, penguatan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKn harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa khususnya para guru PPKn di tengah tantangan dunia pendidikan saat ini.

Ketiga, penguatan ketahanan pribadi guru dan siswa harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah agar proses belajar mengajar tetap terlaksana demi mencapai tujuan nasional yang termaktub pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta demi memperkuat ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizilna, M. M., 2021, The Collaboration Of Pancasila And Civic Education Teacher In Subject Teacher Consultation Forum (MGMP) At Junior High School. *Jurnal Etika dan Demokrasi*, Vol. 6, No.2, hh. 243-253.
- Almanshur, G. D., 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Alouw, Mia A. L., 2020, Upaya Guru dalam Meningkatkan Civic Knowledge

- Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Di SMANegeri 1 Langowan. *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Anggraini, L., 2020, Pendidikan Di sekolah dasar dalam Rangka menyongsong kenormalan baru. *Webminar Nasional. Program Studi pendidikan Sekolah Dasar Universitas dwijendra*. Denpasar.
- Arfah, A., 2021, *Nadiem: PJJ Ciptakan Learning Loss Terbesar Dalam Sejarah RI*. Retrieved November 2021, from <<https://news.detik.com/berita/d-5782477/nadiem-pjj-ciptakan-learning-loss-terbesar-dalam-sejarah-ri>>
- Bachri, B., 2010, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10, No. 1, hh. 46-62.
- Bappenas RI, 2021, *Studi Pembelajaran Penanganan Covid 19 Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- BPS, 2020, *BPS Mentawai*. Retrieved November 2021, from <<https://mentawaikab.bps.go.id/>>
- Branson, M., 1999, *Belajar civic education dari Amerika. (Terjemahan Syarifudin, dkk)*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
- Hamdi, Irwan, M. S., 2016, Dinamika Aktualisasi Diri Pemuda Rantau Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi (Studi Pada Mahasiswa Rantau Asal Sumatera Barat Di Asrama Putri Bundo Kanduang Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 22, No. 3, hh. 306-320.
- Hijrawati Aswat, E. R., 2021, Sosialisasi dan Penguatan Edukasi pada siswa terkait penerapan protokol kesehatan di SDN 1Masiri, demi terciptanya situasi kondusif di Era New Normal. *Jurnal Abdidas*, Vol. 2, No. 3, hh. 521-529.
- Indrawadi, Junaidi, I. M., 2021, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan. *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, hh. 11-15.
- Irawan, Bambang, I. S., 2014, Analisis Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran PKN di Kelas VIII. *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol 3, No 6, h.6.
- Kerr, D., 1999, *Citizenship Education: An International Comparison*, London: NFER.
- Kemdikbud, 2020, *Pandemi, SKB Empat Menteri No 01/KB/2020 tentang pembelajaran tatap muka masa*.
- Koesnandar, A., 2018, Pengembangan Inovasi Pembelajaran Berbasis Tik pada Sekolah di Daerah 3t Papua dan Papua Barat melalui Pendampingan Jarak Jauh. *Kwangsan*, Vol. 6, No. 2.
- Listiqowati, I., 2021, Kondisi Tingkat Pendidikan Masyarakat di Lingkungan VI Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 17, No. 2, hh. 242-258.
- Masyitoh, Iim Siti, S. S., 2019, Urgensi internalisasi nilai karakter dalam pembelajaran PKN. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Miles, B. M. dan. M. Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber*

- Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP.
- Moleong, L., 2014, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monica, Tiara, N. M., 2020, Collaboration of Pancasila and Civic Education Teachers and Guidance Counseling Teachers in the Developing of Student Characters in Senior High School. *Jurnal Etika dan Demokrasi*, Vol 5, No. 2, hh. 256-263.
- Montessori, Maria, J. I., 2020, *Analysis of Teacher Questions in Improving High Order Thinking Skills of Students Through Learning of Pancasila and Civic Education*. Padang: Atlantis Press.
- Nurohmah, A. N., 2021, Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 3, No. 1, hh. 119-127.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun (2020) Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Purwanto, 2020, Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *Journal of Education, Psychology, and Counselling*, Vol. 2, No. 1.
- Raharjo, 2017, Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu Di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 2, hh. 175-189.
- Rohim, A. N., 2020, Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 3, hh. 239-307.
- Subahri, B., 2021, e-Learning dan Metode Pengajaran pada Masa Pandemi. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, Vol. 4, No. 1, hh. 93-108.
- Sudirman, 2021, Mewujudkan Guru PPKn Yang Ideal Melalui Pengembangan Kualitas Kepribadian Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 1, hh. 57-70.
- Suradi, 2019, Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (smart and good citizen). *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 14, No. 2, hh. 112-121.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Propinsi Sumatera Barat.
- Yunisca Nurmalisa, A. M., 2020, Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Civic Conscience. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PK*, Vol. 7, No. 1, hh. 34-46.
- Zaenullah, & E., 2018, Urgensi internalisasi nilai-nilai karakter oleh masyarakat untuk mencegah kenakalan remaja. *Jurnal Ilmiah Likhitaprajna*, Vol. 20, No.. 2, hh. 137-145.
- Zulkarnaen, A. D. H., 2019, *Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia*, Yogyakarta: UAD